

**Kertas Kerja  
Daftar Risiko Prioritas**

<b>Nama Pemda</b> : Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur <b>Tahun Penilaian</b> : 2023 <b>Tujuan Strategis</b> : Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel <b>Urusan Pemerintahan</b> : Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayananan Terpadu Satu Pintu						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	<b>I   Risiko Strategis OPD</b> Jumlah angkatan kerja yang terserap lapangan kerja kecil	RSO.BID01.01	12	Kepala Dinas	Man Kualifikasi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar (pendidikan tertalu tinggi/rendah/tidak sesuai jurusan) Material Machine Money Kurangnya dukungan anggaran untuk pelatihan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja Method Jenis pelatihan belum sesuai kebutuhan perusahaan	Meningkatnya angka pengangguran

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
2	Belum ada follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan	RSO.BID01.04	16	Kepala Dinas	Man Material Machine Money Tidak ada anggaran terkait kegiatan follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan Method Belum ada kegiatan terkait follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan	Tidak mengurangi angka pengangguran
3	Pengawasan untuk Pelaku Usaha yang menjual minuman beralkohol masih belum optimal	RSO.BID03.03	9	Kepala Dinas	1. maraknya tempat penjualan minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol ilegal/tidak berizin 2. Belum optimalnya koordinasi kegiatan pengawasan dengan Dinas Teknis terkait (Diskopindag) 3. Kurangnya SDM bidang pengendalian, pengaduan, data dan informasi	maraknya tempat penjualan minuman beralkohol ilegal mengganggu ketertiban umum

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
4	Pantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal belum optimal	RSO.BID03.04	9	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha tidak taat dalam pemenuhan komitmen perizinan berusaha</li> <li>2. Pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal belum dilaksanakan secara kontinyu serta pelaporannya belum dievaluasi secara maksimal</li> <li>3. belum disusunnya perencanaan pemantauan (pemantauan hanya berupa jadwal yang dikirim dari pusat )</li> <li>4. kurangnya sdm pendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal yang tidak dipenuhi memiliki dampak serius pada masyarakat.</li> <li>2. meningkatnya pengaduan masyarakat</li> <li>3. maraknya tempat usaha yang belum melengkapi komitmen perizinan</li> </ol>

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
5	masyarakat tidak puas dengan hasil konsultasi dan tindak lanjut pengaduan	RSO.BID03.05	9	Kepala Dinas	1. Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat atas perubahan persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan pendirian tempat usaha; 2. kurangnya evaluasi dan analisa atas trend/kecenderungan topik permasalahan pengaduan 3. Masyarakat kurang literasi terhadap persyaratan permohonan pengajuan izin	Masyarakat kurang puas atas layanan yang sudah diberikan
6	Pelaku usaha/investor tidak jadi melakukan ekspansi usaha di Kota Malang	RSO.BID04.01	12	Kepala Dinas	1. kebijakan pembatasan penerbitan ITPMB bagi pelaku usaha yang baru 2. Tidak terlayannya pengajuan perizinan dari pelaku usaha (Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol) yang baru	1. Keluhan Pelaku Usaha atas sulitnya pengurusan perizinan ITPMB di Kota Malang; 2. nilai investasi menurun 3. maraknya tempat penjualan minuman beralkohol minum ditempat dan pengecer minuman beralkohol ilegal serta peredaran minuman beralkohol tidak terkontrol 4. berkurangnya PAD
7	Bukti pendukung persyaratan perizinan tidak sesuai standar/palsu	RSO.BID04.05	9	Kepala Dinas	kelemahan sistem OSS (tidak ada fitur verifikasi dan validasi keabsahan dokumen persyaratan perizinan)	izin Tempat usaha yang terbit tidak sah
II	Risiko Operasional OPD					

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Perselisihan Perusahaan dgn pekerja terkait UMK	ROO.BID01.09	12	Bidang Naker Seksi HI	Man Kesadaran akan hak makin tinggi Material Machine Money Keterbatasan keuangan perusahaan Method	Hubungan Industrial tidak kondusif
2	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kurang akurat	ROO.BID3.01	9	Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi Disnaker PMPTSP Kota Malang	Fitur pada sistem (IZOL) perlu perbaikan	Data yang kurang akurat berimbas pada perencanaan dan evaluasi
3	Kurangnya pembinaan pelaksanaan penanaman modal	ROO.BID3.02	9	Kepala Dinas	1. Data profil pelaku usaha banyak yang tidak diupdate oleh pelaku usaha, berupa status aktif dan tidak aktif serta lokasi yang tidak sama dengan yang diinput di dalam OSS 2. Kurangnya kesadaran dan ketidaktaatan Investor dalam melaporkan LKPM 3. Kurangnya SDM seksi pengendalian dan pelaporan	1. Kinerja tim pengawasan kurang efektif akibat data profil yang tidak update 2. Kondisi realisasi penanaman modal kurang terpetakan dengan optimal 3. Tugas dan fungsi bidang pengendalian, pengaduan, data dan informasi DPMPSTSP terganggu

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
4	Keterlambatan pemrosesan penerbitan pengajuan perizinan dari Pelaku usaha	ROO.BID4.01	9	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	<p>1. Dinas teknis terkait belum menyampaikan perubahan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis rekomendasi perizinan;</p> <p>2. jaringan internet lambat/sedang dilakukan pemeliharaan sistem informasi sehingga tidak dapat menginput data pada sistem OSS/SI-IZOL;</p> <p>3. pelaku usaha belum memahami tata cara input data/pemenuhan persyaratan dasar perizinan pada sistem OSS RBA</p> <p>4. Pelaku usaha belum melakukan migrasi dari sistem OSS versi lama ke versi baru OSS RBA</p> <p>5. Pelaku usaha kurang memahami penggunaan sistem OSS</p>	Keluhan Pelaku usaha atas sulitnya penggunaan sistem OSS

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
5	Komplain dari pelaku usaha atas keterlambatan proses layanan perizinan dan non perizinan	ROO.BID4.02	9	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	1. kurang optimalnya Perangkat daerah teknis terkait dalam menindaklanjuti perubahan regulasi dari pusat; 2. jaringan internet lambat/tidak dapat menginput data pada sistem OSS/SI-HZOL	Maraknya tempat usaha belum berizin

Menyetujui,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si**

Pembina Tk. I

19790709 199810 1 001